

RANCANGAN

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI III DPR RI KE PROVINSI DKI JAKARTA

=====

I. PENDAHULUAN

Ramadan selalu membawa makna yang beragam bagi setiap orang dari pelbagai latar sosial dan budaya. Setiap daerah memiliki tradisi khas masing-masing dalam menyambut Ramadan. Bulan yang dikenal sangat suci bagi umat Islam ini memang bagi sebagian kelompok masyarakat diperlakukan sangat istimewa, seistimewa pesan dan keeksklusifan yang dikandungnya. Prosesi dan tradisi penyambutannya kemudian mengalami transformasi dari masa ke masa. Ada kelompok masyarakat yang memahami substansi dan esensi Ramadan, namun sebagian lagi melihatnya sebagai aktivitas rutin tahunan dalam penanggalan hijriah yang berisi aturan-aturan berupa perintah dan larangan.

Mudik dan kumpul keluarga merupakan tradisi Ramadan yang dilakukan turun temurun. Tradisi itu telah dipelihara sejak dulu dan telah berlangsung turun temurun. Namun salah satu hal yang sering menjadi masalah di tengah masyarakat menjelang Ramadhan adalah masalah keamanan. Masalah keamanan dan ketertiban saat ini menjadi fokus penting bagi seluruh masyarakat dan pemerintah. Munculnya beberapa kasus dan konflik menjelang ramadhan di negara ini tentunya membawa keprihatinan dan menciptakan kondisi yang tidak kondusif bagi masa depan bangsa. Masyarakat sebagai warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala macam ancaman apapun. Sudah menjadi kebiasaan di negeri ini bahwa memasuki bulan Ramadan dan hingga lebaran, masyarakat tentunya disibukkan dengan aktifitas keagamaan yang tentunya dengan harapan dapat menjalankan ibadah keagamaan dengan khusuk dan hikmat tanpa ada gangguan apapun. Masyarakat harus diberikan rasa aman selama menjalankan ibadah di bulan Ramadan hingga lebaran tiba.

Polri dan Kejaksaan memiliki peran sangat penting dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat khususnya menjelang bulan Ramadan dan lebaran harus diberikan perhatian penuh karena kriminalitas cenderung meningkat, seluruh satuan harus difungsikan melakukan pengamanan di bulan itu, mulai dari Satuan Lalu-lintas, Reserse sampai Intelijen. Hal ini diperlukan karena tidak menutup kemungkinan akan orang tak bertanggung jawab mengganggu keamanan.

Komisi III DPR RI memandang perlu untuk mencari masukan dan sekaligus melaksanakan fungsi pengawasan dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Kunjungan perlu dilakukan ke wilayah yang tengah dan rentan dilanda konflik yang potensi gangguan keamanannya tinggi. Hal ini menjadi bagian penting bagi Komisi III DPR RI untuk mencari masukan secara

komprehensif sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan keamanan di tingkat pusat khususnya menjelang bulan Ramadan dan Lebaran.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Komisi III DPR RI dalam kunjungan spesifik ini akan melakukan pertemuan dengan mitra kerja yaitu Kepolisian dan Kejaksaan Provinsi DKI Jakarta untuk memperoleh keterangan sebagaimana berikut :

1. Mendapatkan informasi dari Kepolisian dan Kejaksaan terkait upaya upaya yang akan dilakukan untuk menciptakan kondisi keamanan yang kondusif.
2. Mengetahui upaya antisipasi, penanganan dan penanggulangan terhadap korban yang terkena eksekusi dari gangguan keamanan.
3. Mengetahui perkembangan penegakan hukum terhadap pelaku gangguan keamanan maupun aparat yang melakukan tindakan represif yang tidak sesuai prosedur.

III. WAKTU DAN TEMPAT

Pertemuan ini dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : 27 Mei 2019

Tempat : Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

IV. TIM KUNJUNGAN

No	Nama	Keterangan
1	Drs. H. Kahar Muzakir	Ketua Tim
2	H. Desmond J. Mahesa, SH., MH.	Anggota Tim
4	Erma Suryani Ranik, SH.	Anggota Tim
6	DR. Ir. Adies Kadir, SH., MHum.	Anggota Tim
7	H. John Kenedy Azis, SH.	Anggota Tim
8	DR. Junimart Girsang, SH.	Anggota Tim
9	Masinton Pasaribu , SH.	Anggota Tim
10	Ichsan Soelistio	Anggota Tim
11	Drs. M. Nurdin, MM.	Anggota Tim
12	Drs. Erwin TPL Tobing	Anggota Tim
13	Arteria Dahlan, ST, SH., MH	Anggota Tim
14	Wihadi Wiyanto, SH., MH.	Anggota Tim
15	Didik Mukrianto, SH., MH.	Anggota Tim
16	H. Muslim Ayub, SH., MH.	Anggota Tim
17	Nur Chayati, SH	Anggota Tim
18	H. Muhammad Nasir Djamil, M.Si	Anggota Tim
19	Drs. H. Tb. Soemandjaja	Anggota Tim
20	H.M. Amir Uskara , M.Kes.	Anggota Tim
21	Drs. Y. Jacki Uly, MH.	Anggota Tim
22	Samsudin Siregar, SH.	Anggota Tim

V. HASIL KUNJUNGAN

Dari kunjungan dan pertemuan yang dilaksanakan, beberapa hal yang dijelaskan dan mendapatkan perhatian dari mitra rapat adalah sebagai berikut :

Kepolisian Daerah Metro Jaya

Konsep Polda Metro Jaya dalam Rangka Persiapan Pengamanan Jalur Mudik dan Tempat-Tempat Ibadah Serta Pengamanan Arus Balik

Operasi Ketupat Jaya – 2019 Merupakan Operasi Kepolisian Terpusat Mabes Polri dan kewilayahan, bersifat terbuka dan kemanusiaan dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif didukung penegakan hukum dan deteksi dini yang dibantu instansi terkait dan mitra kamtibmas lainnya dalam rangka pemeliharaan keamanan guna menjamin stabilitas kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polda Metro Jaya khususnya dalam rangka pengamanan hari Raya Ramadhan Idul Fitri 1440 H / 2019 M.

Satgasda Metro Jaya beserta seluruh jajarannya dan perkuatannya melaksanakan Operasi Kepolisian Terpusat “Ops Ketupat Jaya - 2019” selama 13 (Tiga Belas) hari mulai “H – 7” S/D “H + 5” Tgl. 29 Mei s/d 10 Juni 2019 di wilayah hukum Polda Metro Jaya Dengan mengedepankan kegiatan Satgas Turbinjali (Pengaturan, Pembinaan, Penjagaan, Patroli), Kamseltibcarlantas, Lidik Sidik dan Banops dalam rangka pengamanan kegiatan Idul Fitri 1440 H, guna mewujudkan situasi Kamtibmas dan Kamseltibcarlantas yang kondusif, sehingga masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan rasa aman dan nyaman.

Operasi Ketupat Jaya 2019 melibatkan 6.226 personil yang terdiri dari personel Polri dan beberapa instansi terkait yang dapat mendukung pelaksanaan Operasi Ketupat 2019. Adapun rincian personil yang terlibat :

1. Satgasda 3.206 personil.
2. Satgasres 2.375 personil.
3. TNI 90 personil.
4. Pemda DKI Jakarta 455 personil.
5. Jasa Marga 100 personil.

Pelibatan personel dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2019 dibagi dalam 4 agenda yaitu : Ramadhan, jelang lebaran saat masyarakat mudik, pengamanan arus angkutan lebaran, malam takbir dan perayaan Idul Fitri dengan kegiatan dan sasaran yang masing-masing memiliki lokasi dan obyek sasaran yang berbeda.

Koordinasi dan Kerja Sama dengan Pihak Terkait

Guna tercapainya target operasi dan terciptanya sitkamtibmas yang kondusif selama Operasi Ketupat Jaya 2019, Polda Metro Jaya telah dan akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait dan seluruh potensi masyarakat sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pertemuan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat , ormas , pemerintah daerah, pengusaha hotel/tempat hiburan agar menghormati ibadah di Bulan Suci Ramadhan dan toleransi antar umat beragama serta mengantisipasi *sweeping* oleh kelompok/ormas tertentu.
- b. Bersama Pemda DKI dan TNI melakukan penertiban tempat hiburan malam & melaksanakan penegakan hukum terhadap segala bentuk tindak pidana dengan sasaran perjudian/peredaran miras/narkotika/ prostitusi.
- c. Bersama TNI dan Pemda DKI melakukan patroli skala besar.
- d. Bekerja sama dengan BNN dan dengan Dinas Kesehatan DKI melakukan tes urine terhadap sopir yang mengangkut penumpang mudik lebaran.
- e. Bersama Dinas Perindag dan Badan POM melakukan operasi pasar terhadap barang-barang kadaluarsa.
- f. Melakukan penerangan kepada masyarakat agar ikut serta berperan aktif dalam menjaga keamanan diri dan lingkungan serta saling menghormati antar sesama umat beragama.
- g. Bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok.

Sesi Pendalaman

Dalam sesi pendalaman poin-poin masukan/pertanyaan yang disampaikan serta tanggapan yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keamanan masyarakat di Jakarta pada saat Hari Raya? Persoalan keamanan rumah-rumah yang ditinggal mudik? Persoalan keamanan di jalan seperti begal, penjahbretan, gendam, dan hipnotis? Kesiapan personel Polri dalam melakukan pengamanan?
2. Inovasi apa yang akan dilakukan dalam melaksanakan Operasi Ketupat?
3. Kabupaten Bogor perlu ada perhatian khusus sebab masih banyak imbauan dari Kepolisian yang tidak terlaksana dengan baik.
4. Seberapa efektif keberadaan *contra flow* hingga Brebes dan bagaimana keamanan adanya *contra flow*? Mengingat jumlah kendaraan semakin meningkat. Apakah jumlah posko mudik disepanjang jalur mudik sudah mencukupi? Apakah ada indikasi serangan terror ke rumah-rumah ibadah?
5. Upaya antisipasi adanya kerusakan, antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana pada saat hari raya, pengamanan bahan pangan untuk menghindari makanan kadaluarsa dan daging oplosan?
6. Terkait arus mudik sepeda motor banyak terjadi pelanggaran seperti berboncengan lebih dari satu orang, apakah ada Koordinasi dengan Polda-Polda pada jalur mudik yang dilewati oleh para pemudik sebab dapat menimbulkan kemacetan dan persoalan keselamatan lalu lintas.

Penjelasan tambahan dari Kapolda Metro Jaya

- 1) Segala potensi kerawanan menjelang, pada saat, dan pasca lebaran seperti jambret, gendam, hipnotis telah melakukan Operasi Cipta Kondisi. Terhadap rumah kosong mengedepankan para BabinKamtibnas di area sekitar, melakukan imbauan terhadap masyarakat, mengaktifkan Pamswakarsa dan Pos-Pos Keamanan lingkungan.
- 2) Pengamanan diluar Jakarta melakukan koordinasi dengan Gubernur dan Bupati di daerah tersebut.
- 3) Polda Metro Jaya telah melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, dengan Pemerintah Daerah, BMKG, BNPB, dan Basarnas terhadap kemungkinan terjadinya bencana.
- 4) Telah menyiapkan personel untuk pengamanan rumah ibadah. Telah menyampaikan imbauan terhadap potensi kerawanan.
- 5) Memiliki Satgas Pangan untuk memonitor dan melakukan pengawasan terhadap peredaranserta keamanan bahan pangan untuk menghindari terjadinya peredaran makanan yang berbahaya termasuk daging oplosan.
- 6) Menyiapkan kegiatan Kepolisian yang ditingkatkan yaitu kegiatan gabungan Polri, TNI, Pemda, dan Satpol PP dengan melakukan patrol besar untuk meminimalisir potensi penjambretan, pencurian, dan begal.
- 7) Akan melakukan *mapping* pada daerah-daerah rawan guna melakukan pengamanan pada malam takbiran.
- 8) Masyarakat diimbau untuk melakukan mudik masal dengan menggunakan bis atau kereta api dan telah menyiapkan transportasi untuk mengangkut kendaraan bermotor, hal ini dilakukan sebab angka kecelakaan sepeda motor sangat tinggi.
- 9) *Contra Flow* pada arus mudik akan dilakukan mulai KM 73 sampai dengan KM 200 mulai pukul 12.00 sampai 24.00 pada tanggal 29 Mei hingga 2 Juni, sedangkan untuk arus balik dilakukan *contra flow* dilakukan pada jam yang sama serta dimulai pada tanggal 5-6 Juni.

Kejaksaaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta

Upaya-upaya dan solusi yang telah dilakukan dalam penanganan tindak kejahatan:

1. Sesuai program Reformasi Birokrasi di Kejaksaan Tinggi DKI yang membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Bidang Tindak Pidana Umum dalam penanganan perkara/tindak kejahatan telah memanfaatkan sistem pelaporan berbasis Informasi Teknologi mulai dari tahap pra penuntutan hingga eksekusi berupa *Case Management System*
2. (CMS) sebagaimana yang telah di-*launching* oleh Pusat Data Statistik dan Kriminal Teknologi Informasi Kejaksaan RI. CMS-IT kedepan akan terkoneksi dengan SPPT-IT (Sistem data base Penanganan Perkara Terpadu berbasis Informasi Teknologi).

Kehadiran SPPT-IT akan membuat instansi penegak hukum akan terkoneksi satu sama lain dan terintegrasi dalam satu administrasi penanganan perkara.

3. Terkait Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sebagai bagian dari Sentra Gakkumdu Provinsi DKI Jakarta sudah berperan secara aktif, meningkatkan koordinasi dan hubungan kerjasama sinergis dengan Bawaslu RI, POLRI juga Pengadilan dan para Ketua serta pengurus Parpol peserta pemilu dan pengusung calon, dalam mencegah dan memecahkan berbagai persoalan terkait tindak pidana pemilihan umum yang terjadi pada setiap penyelenggaraan Pemilu. Selain itu terkait peristiwa demo tanggal 21-22 Mei 2019, Kejaksaan Tinggi DKI telah menerima SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dari Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya terkait tindak pidana Makar.
4. Bidang Tindak Pidana Khusus
Upaya adalah :
Diutamakan penyelamatan kerugian keuangan negara untuk Tindak Pidana Korupsi, Pajak dan Kepabeanan serta diarahkan sangkaan TPPU

Penanganan perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat:

Untuk perkara korupsi, Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta saat ini sedang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi atas Penggunaan Anggaran PT PLN Batu Bara (PT. PLN.BB) sebesar Rp. 477.359.539.000,- yang sedang dalam tahap persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahwa saat ini terhadap kerugian keuangan negara tersebut telah dikembalikan oleh Untuk Tindak Pidana Perpajakan, tindak Pidana Bea dan Cukai, serta Tindak Pidana Kepabeanan, tidak ada perkara yang dianggap menarik perhatian.

Secara umum penanganan perkara pada Bidang Tindak Pidana Khusus dirasa cukup kondusif, aman dan terkendali.

Tindak Pidana Umum

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta saat ini tengah melakukan penanganan kasus hukum yang mendapat perhatian media dan masyarakat luas, kasus tersebut diantaranya :

- a. Dugaan Makar Yang Dilakukan Eggi Sudjana. Eggi Sudjana dalam ini diduga telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 107 dan 110 KUHP jo Pasal 87 KUHP dan UU No.1 th 1946. Selain Eggi, Kejati DKI Jakarta akan menangani kasus perkara makar dengan tersangka Lieus Sungkharisma yang juga diduga melanggar UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 dan atau Pasal 15 terhadap keamanan negara/makar UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 107 jo Pasal 87 dan atau Pasal 163 bis jo Pasal 107.
- b. Selain itu kasus hukum lain yang akan ditangani oleh Kejati DKI Jakarta adalah penyelundupan senjata yang diduga dilakukan oleh Mayjen TNI (Purn) Soenarko. Soenarko dilaporkan dengan Pasal 110 juncto 108 UU Nomor 1 Tahun 1946 KUHP

tentang Makar dan Pasal 163 bis juncto 146 KUHP tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum.

- c. Terkait dengan adanya rencana makar maka dapat dipastikan bahwa dalam beberapa bulan kedepan Kejati DKI Jakarta akan menangani kasus dugaan makar yang melibatkan tokoh - tokoh politik nasional seperti Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein dan tokoh agama Bachtiar Nasir dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal ini tentu akan menjadi beban tersendiri namun Kejati DKI Jakarta akan senantiasa bersikap profesional dengan menjunjung profesionalitas dan azas hukum yang berlaku serta bersikap transparan untuk menghindari adanya kecurigaan publik bahwa kasus makar tersebut merupakan upaya kriminalisasi terhadap para tokoh yang berbeda pendapat dengan pemerintah.
- d. Kasus lain yang ditangani oleh Kejati DKI Jakarta adalah penyebaran hoax yang Ratna Sarumpaet yang telah memasuki materi sidang mendengarkan keterangan terdakwa yang berlangsung pada 14 Mei 2019.

Sesi Pendalaman

Dalam sesi pendalaman poin-poin masukan/pertanyaan yang disampaikan serta tanggapan yang disampaikan oleh Kajati Provinsi DKI adalah sebagai berikut :

1. Agar Kejaksanaan dapat menjawab apa yang menjadi stigma didalam masyarakat agar pemberantasan korupsi dapat dimaksimalkan. Diharapkan upaya pencegahan dapat dikedepankan dan tidak hanya terfokus pada penindakan.
2. Pendalaman terkait Disiplin dalam perhitungan kerugian keuangan Negara bahwa didalam UU No 15 Tahun 2004 terdapat pasal yang menyatakan pengembalian kerugian Negara tidak menghapuskan pidana, sejauh mana pasal ini menjadi hambatan dalam penegakan hukum, mana yang lebih dibutuhkan oleh Negara? *Punishment* atau pengembalian kerugian Negara atau keduanya?
3. Lamanya eksekusi karena keterbatasan dana, mempertanyakan didalam wilayah hukum DKI Jakarta berapa aset-aset terpidana yang sudah inkrah?
4. Perlu untuk memperbaiki Jaksa-Jaksa di KPK agar spiritnya tidak hanya untuk menjatuhkan hukuman.
5. Zona integritas pada prakteknya tidak efektif, terobosan apa yang akan dilakukan?
6. Supervisi tindak pidana pemilu, kedepan perlu untuk lebih dimaksimalkan.
7. Terhadap tindak pidana makar perlu untuk dipertegas, jangan sampai Negara toleran terhadap kekerasan.
8. Meminta SDM di Kejaksanaan dibenahi, ada beberapa pejabat yang masih belum waktunya untuk menjadi Pejabat. Tindak Pidana Korupsi perlu untuk ditingkatkan.

Penjelasan tambahan dari Kajati Provinsi DKI Jakarta

- 1) Kejaksanaan Tinggi kedalam zona integritas, menerapkan sistem IT, membuat pakta integritas, telah membuat surat kepada mitra strategis atau *stakeholders* untuk tidak menerima Parsel Hari Raya dalam rangka mewujudkan zona bebas dari korupsi.

- 2) Program pencegahan korupsi antara lain program Jaksa masuk sekolah, penanganan hukum berupa layanan langsung ke masyarakat dengan turun langsung dan tidak bersifat menunggu.
- 3) Pembentukan zona integritas sudah menginstruksikan untuk membuat banner-banner berupa seruan untuk menegakan hukum dan tidak menerima gratifikasi. Apabila ada pihak Kejaksaan meminta maka akan diproses dan ditindak.
- 4) Parameter keadilan ada SOP nya dan tidak bias keluar dari ketentuan tersebut walaupun tidak baku namun perlu meminta petunjuk Kejaksaan Agung apabila membutuhkan diluar SOP. Kemudian Kejaksaan akan meningkatkan pelayanan masyarakat tanpa memungut biaya.
- 5) Kejaksaan tidak melakukan perhitungan Kerugian Negara, perhitungan ini dilakukan oleh BPK, BPKP, dan Akuntan Publik berdasarkan SEMA No 4. Terhadap kasus Kok Ciang sudah mengembalikan kerugian Negara full sebesar 477 M namun tidak menghapuskan pidananya dan tetap dipidana selama 4 tahun sebab pengembalian kerugian tersebut bukan merupakan *mens rea* pelaku.

VI. PENUTUP

Demikian laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi DKI Jakarta dengan harapan hasil dari pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR-RI ini, diperoleh berbagai masukan yang sangat penting bagi tugas Dewan yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan Mitra Kerja Komisi III DPR RI pada Masa Persidangan yang akan datang.